



RENCANA KERJA (RENJA) 2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah mempunyai arti strategis karena Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah setiap tahun. Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2022 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen Perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen renja ini.

Semarang, Januari 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH



HAERUDIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700729 199603 1 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. A. YANI NO. 160 TELP (024) 8454990 FAX. (024) 8414205,8313122
SEMARANG – 50138

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Renja PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, serta mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah Tahun 2022.

Semarang, Januari 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TENGAH

HAERUDIN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700729 199603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud Dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 dan Capaian Renstra PD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	22
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	22
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	23
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH....	25
BAB V PENUTUP	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persandingan Program Prioritas Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021.....	6
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.....	8
Tabel 2.3	Analisis Kinerja Pelayanan OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.....	15
Tabel 2.4	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.....	20
Tabel 2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.....	21
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
Tabel 4.1	Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan OPD, sebagai implementasi dari pentahapan rencana strategis OPD. Renja-OPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sesuai amanat tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2022. Renja OPD merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh OPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan rencana tahunan pelaksanaan Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2018 – 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah senantiasa menyesuaikan diri untuk selaras dengan dinamika dan perubahan yang terus berkembang di Provinsi Jawa Tengah. Pada satu sisi, perkembangan tersebut merupakan sebuah peluang yang dapat bermanfaat bagi pembangunan wilayah. Namun pada sisi lain, sedikit banyak akan memunculkan berbagai permasalahan kompleks yang menuntut untuk dihadapi dan diselesaikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya perencanaan

program dan kegiatan secara terarah dan terpadu yang dapat memberi solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Khususnya Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka perencanaan program dan kegiatan dimaksud dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Rencana Kerja (RENJA) OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah ini merupakan dokumen perencanaan untuk menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022. Dalam Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 telah ditetapkan kinerja yang akan dicapai untuk seluruh indikator kinerja juga ditetapkan nilai kuantitatif yang dijadikan dasar pengukuran keberhasilan pada akhir periode pelaksanaannya. Rencana Kerja menjelaskan berkaitan antara kegiatan dan sasaran, kebijakan dengan programnya, dan keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah senantiasa mengacu kepada peraturan Perundang-undangan atau landasan hukum yang berlaku, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
24. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/0001248 tanggal 22 Januari 2021 tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
25. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.24/0004437 tanggal 19 Maret 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2022;
26. Surat Edaran Sekretaris Daerah Jawa Tengah Nomor 965/2637 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/kegiatan dalam rangka menacapai sasaran strategis.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 adalah :

- a. Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.
- b. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Provinsi Jawa Tengah

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana program dan kegiatan beserta indikator, target dan pagu indikatifnya untuk tahun 2022

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dari Rencana Kerja Tahun 2022

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2020 dan Capaian Renstra PD

Dengan diterbitkannya Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah ada perubahan nomenklatur program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Persandingan Program Prioritas Daerah Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	Bidang Urusan	Program Prioritas Perangkat Daerah	
		Tahun 2020	Tahun 2021 Pemerintahan Umum
1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah
		Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik
		Program Penguatan Ketahanan Bangsa	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
			Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
Program Penguatan Politik Dalam Negeri	Program Peningkatan Peran Partau Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik		

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2020 dan perkiraan target tahun 2021. Terkait dengan

hal tersebut, Renja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah. Renja juga merupakan sebagai alat ukur menilai tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Sampai dengan Triwulan IV ini terdapat beberapa kegiatan yang melampaui target Tahun 2021, antar lain :

1. Jumlah Unjuk rasa tertangani, dikarenakan menggunakan jenis progres negatif artinya semakin sedikit unjuk rasa di Jawa Tengah maka semakin baik capaiannya. Mapping potensi permasalahan dapat difasilitasi dengan pendekatan melalui pertemuan-pertemuan seperti FGD, sosialisasi ataupun fasilitasi kegiatan.
2. Jumlah laporan konflik yang tertangani, dinamika permasalahan dilapangan berdasarkan pemetaan potensi konflik, jumlahnya lebih besar dari target, potensi tersebut tetap dilakukan penanganan melalui pelaksanaan FGD penguatan ruang publik agar potensi permasalahan dapat diatasi sebelum muncul konflik / kejadian.
3. Jumlah pantauan orang asing, kondisi pandemi Covid-19 Tahun 2021, dalam rangka pembatasan penyebaran Badan Kesbangpol Prov. Jateng diharuskan bukan hanya mengawasi arus kedatangan orang asing namun juga pendataan, pengawasan dan pantauan terhadap seluruh orang asing yang ada di Jawa Tengah, termasuk para pekerja asing yang selama ini sudah tinggal lama di Jawa Tengah.
4. Jumlah masyarakat yang ikut dalam Penyelesaian konflik sosial, kondisi adaptasi Covid-19 mengharuskan beberapa kegiatan mengalami pembatasan kepesertaan tatap muka, namun penggunaan metode hybrid (luring dan daring) justru menambah jumlah peserta yang terlibat kegiatan secara virtual.

Hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021				
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
0	00	01		PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	100				100			
					Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100				100			
0	00	01	101	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Politik Dalam Negeri	9500		500	500	500	920	920	100
					Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Ideologi dan Kewaspadaan	7400		550	550	100	100	100	100
					Jumlah Masyarakat yang terlibat dalam Pembinaan Ketahanan Bangsa	4600		600	600	100	50	50	100
					Jumlah Capaian Program dan Kegiatan Dalam Perencanaan, Pengendalian, dan Pembinaan Kesbangpol	35		35	35	100	35	35	100
					Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah	50		10	10	100	10	10	100
					Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	50		10	10	100	10	10	100
0	00	01	102	Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)	60		12	12	100	12	12	100
0	00	01	103	Administrasi Umum	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	60		12	12	100	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	60		12	12	100	12	12	100
		Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kepegawaian perangkat daerah	60		12	12	100	12	12	100
		Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	5		1	1	100	3	3	100
		Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	60		12	12	100	12	12	100
		Jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan.	9		5	0	0	2	0	0
		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	60		12	12	100	12	12	100
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	60		12	12	100	12	12	100
		Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah	5		1	1	100	1	1	100
		Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	60		12	12	100	12	12	100
		Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	60		12	12	100	12	12	100
		Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	60		12	12	100	12	12	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021				
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
		Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah.	60		12	12	100	12	12	100			
0	00	01	104	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan.	300		100	100	100	100	0	0
					Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar	1200		240	240	100	100	100	100
0	08	0	102	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wasbang	90				83			
8	01	02	101	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kader Pancasila yang terbentuk	2025		450		100	100	100	100
					Jumlah Kader Bela Negara yang terbentuk	2225		100	100	100	150	0	0
					Jumlah masyarakat yang paham Ideologi Pancasila	4450		100	100	100	4.240	4.240	100
					Jumlah Masyarakat yang paham Wasbang dan nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa	6225		100	100	100	160	160	100
					Jumlah Kader Gerakan Nasional Revolusi Mental yang terbentuk	2175		50	50	100	50	50	100
0	08	0	106	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan dan deteksi dini	90		81		83			
					Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	100		100		100			
8	01	06	101	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kader Resolusi Konflik yang terbentuk	7700		375	375	100	50	50	100
					Jumlah laporan deteksi dini	60		6	6	100	4	4	100
					Jumlah Unjuk rasa tertangani	1650		200	332	166	350	280	125

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah Dukungan Pengamanan Pemilu	64		21	21	100	0	0	
		Jumlah laporan konflik yang tertangani	726		150	150	100	46	53	115,22
		Jumlah Pemetaan/Mapping Potensi Konflik Sosial	5		1	1	100	1	1	100
		Jumlah kunjungan VIP/VVIP tertangani	88		20	37	411	5	5	100
		Jumlah laporan konflik sosial	15		3	3	100	2	2	100
		Jumlah pantauan orang asing.	31200		6000	2938	73,45	2.000	7.500	375
		Jumlah masyarakat yang ikut dalam Penyelesaian konflik sosial.	2180		70	70	100	4.800	5.000	104,17
0	00	80	104	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa	90		81		83
8	01	04	101	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah orang yang difasilitasi Pemberdayaan Ormas dalam rangka Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan	2200		50	50	100
					Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Penguatan Generasi Muda Lintas Etnis	1600		90	90	100
					Jumlah Generasi Muda Lintas Agama dan Penghayat Kepercayaan yang difasilitasi	1120		180	180	100
					Jumlah Fasilitasi Gelar Seni dan Budaya Daerah	268		14	14	100
					Jumlah pembinaan dalam rangka harmonisasi dan Kerukunan Antar Etnis serta Akulturasi Budaya	2160		480	480	100
					Jumlah pembinaan Etnisitas dengan Negara	1120		90	90	100
					Jumlah orang yang dilakukan pembinaan dalam rangka pemeliharaan keharmonisan dan	1920		90	90	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021				
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)			
		kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan											
0	00	80	105	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa	90		81		83			
8	01	05	101	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah laporan fasilitasi/ Pembinaan/ Monev Bidang Ketahanan Ekonomi	455		45	45	100	70	70	100
					Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pembinaan & Pengembangan Ketahanan Ekonomi	5570		1350	1350	100	440	440	100
					Jumlah Kemitraan dengan ormas dalam rangka peningkatan kapasitas Masyarakat Bidang Ketahanan Ekonomi	140		20	20	100	100	100	100
					Jumlah Kajian Strategik atas Pemetaan/Mapping Kondisi Ketahanan Bangsa di Jawa Tengah	40		2	2	100	4	4	100
0	00	80	103	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase masyarakat yang paham terhadap aspek-aspek IDI	90		81		83			
8	01	03	101	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah masyarakat yang ikut Sosialisasi penanganan dampak Pemilu/Pilkada	2560		550		50	50	50	100
					Jumlah Kader Partai Politik yang terdidik	2060		200	200	100	4.240	4.240	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Renja PD Tahun 2020	Realisasi Renja PD Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Jumlah Pemilih Pemula yang ikut Pendidikan Politik	9300		500	500	100	280	280	100
		Jumlah Pengembangan Demokrasi di Jawa Tengah	1900		50	50	100	40	40	100
		Jumlah Parpol yang terkiat dalam pelatihan penatausahaan Bantuan Keuangan Parpol	2000		50	50	100	50	50	100
		Jumlah Fasilitasi Forkopimda	2500		500	500	100	135	135	100
		Hasil Pendataan Parpol	175		35	35	100	35	35	100
		Jumlah Ormas dan Toma/ Toga yang ikut Penguatan Peran Politik	880		80	80	100	10	10	100
		Jumlah Masyarakat yang ikut Pendidikan Politik yang berdasarkan Pancasila dan UUD'45	11000		540	540	100	420	420	100
		Jumlah masyarakat yang ikut Sosialisasi Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada	2580		400	400	100	150	0	0

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Capaian kinerja merupakan informasi yang berisi ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu program/kegiatan. Capaian kinerja harus berupa angka numerik dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang dijalankan oleh sumber daya internal seperti manusia, uang, peralatan dan metode sangat menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian sasaran organisasi pada akhir periode pelaksanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilaksanakan dengan memanfaatkan data kinerja.

Pelaksanaan kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 berdasarkan LAKIP 2020 yang sudah disusun menetapkan dua sasaran strategis, dua indikator kinerja. Pelaksanaan program/ kegiatan dalam pencapaian kinerja tahun 2020 secara umum dapat dicapai dengan baik. Sampai akhir Desember 2020 pencapaian realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan 96,12%. Pencapaian hasil realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah**

No	Indikator	Target SPM	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa											
	Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	-	-	81	83			90,6				-
2	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap politik											
	Persentase masyarakat yang paham terhadap politik	-	-	81	83			86,53				-
3	Meningkatnya ketahanan IDEPOL Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik											
	Indeks ketahanan IDEPOL Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-			3.12	3.35			3.12	3.35	-
4	Meningkatnya Ketahanan EKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik											
	Indeks Ketahanan EKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-			2.97	3.14			2.97	3.14	-

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

A. Kinerja Pelayanan OPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah merupakan institusi teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat. Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan peran dan fungsi pemerintahan dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan serta membangun sistem politik yang demokratis guna mewujudkan program pembangunan jangka menengah nasional maupun daerah yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat.

Pada tahun 2022 sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2018-2023, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2022 - 2023, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya ketahanan IDEPOL Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- b. Meningkatnya Ketahanan EKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pencapaian sasaran strategis pada tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan 6 program dan 13 kegiatan.

B. Permasalahan yang Dihadapi

Dari dinamika sosial politik yang berkembang di masyarakat Indonesia pada umumnya dan Provinsi Jawa Tengah pada khususnya, maka masalah-masalah yang dihadapi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah berdasarkan tugas, pokok dan fungsi serta dalam menghadapi masa pandemi Covid-19 adalah :

1. Bidang ideologi dan Kewaspadaan Nasional:
 - a. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme;
 - b. Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang bersifat anarkis;
 - c. Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah.
 - d. Terhitung 6 kasus konflik keagamaan pada masa pandemi terkait penolakan jenazah maupun kegiatan keagamaan.
 - e. Meningkatnya gangguan kamtibmas terutama terhadap narapidana yang mendapat asimilasi akibat masa pandemi Covid 19 yang kembali melakukan tindakan pidana.
2. Bidang Ketahanan Bangsa:
 - a. Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba;

- b. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat;
 - c. Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan;
 - d. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial;
 - e. Terdapat 12 kejadian konflik sosial dalam penyaluran Bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19.
3. Bidang Politik Dalam Negeri :
- a. Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi;
 - b. Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat masih dibawah target nasional;
 - c. Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu;
 - d. Terjadi pengunduran pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, karena masa pandemi Covid 19, sehingga Dari 270 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020, terdapat 208 Kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya pada bulan Februari 2021 mengakibatkan adanya kekosongan Kepala Daerah.

C. Tantangan dan Peluang

Adapun tantangan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah antara lain:

- a. Relatif rendahnya pemahaman generasi muda terhadap Pancasila, UUD 1945, ke-bhineka-an, NKRI, demokratisasi, revolusi karakter bangsa dan restorasi sosial budaya serta stabilitas Jawa Tengah dalam rangka memantapkan ideologi dan wawsan kebangsaan;
- b. Belum tertatanya struktur politik, pemantapan budaya politik, dinamika politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan politik dalam negeri yang lebih demokratis;
- c. Masih terdapat konflik perebutan dalam pengelolaan sumber daya alam (termasuk pesisir) di masyarakat sebagai dampak meningkatnya kegiatan penggalian, pertambangan dan industri;
- d. Terdapat gejala menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME dalam masyarakat.
- e. Masih adanya sikap diskriminatif dari kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas di masyarakat.
- f. Masih adanya aksi dan kegiatan terorisme atau kekerasan.

Dari tantangan diatas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah memiliki sejumlah peluang sebagai berikut:

- a. Semakin membaiknya pemahaman akan keanekaragaman budaya nilai-nilai kebangsaan yang dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. Kesadaran masyarakat untuk menjaga eksistensi bangsa melalui peningkatan wawasan kebangsaan, penanganan konflik dan peningkatan kewaspadaan dini;
- c. Kesadaran dan partisipasi masyarakat Jawa Tengah dalam berpolitik saat ini terus tumbuh;
- d. Semakin kuatnya kelembagaan demokrasi sebagai penampung aspirasi masyarakat;
- e. Stabilitasnya sistem politik Jawa Tengah sehingga memberikan ruang bagi pengembangan sistem politik yang demokratis.

D. Rekomendasi untuk Ditindaklanjuti

Untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di Jawa Tengah tersebut diperlukan solusi atau rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Adapun rekomendasi yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan pengamalan terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat.
2. Memberikan pemahaman akan pentingnya pelestarian dan pengamalan nilai-nilai dan etika budaya bangsa di masyarakat.
3. Melakukan sosialisasi terkait etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada penurunan tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dan kaum wanita, baik dalam pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan publik, di masyarakat.
4. Meningkatkan Kinerja Pokja IDI untuk menyusun Rencana Aksi guna peningkatan skor IDI;
5. Peningkatan penggunaan Media Sosial dalam melakukan sosialisasi nilai-nilai Pancasila; partisipasi politik dan Wawasan Kebangsaan;
6. Melakukan koordinasi terhadap instansi terkait agar tidak terjadi kekerasan dan konflik di masyarakat, baik konflik politik dalam pemilu, konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi, konflik keagamaan akibat perbedaan paham keagamaan, konflik industrial yang berkaitan upah, dan konflik lahan dan sumber daya alam.
7. Melakukan sosialisasi mengenai pendidikan politik kepada seluruh elemen masyarakat;
8. Koordinasi dan kerjasama antara Badan Penyelenggara Pemilu dan aparat terkait dalam rangka antisipasi isu negatif yang berkembang;
9. Perlu tindakan tegas terhadap pelaku dugaan money politic;
10. Koordinasi antara Badan Penyelenggara Pemilu dan instansi terkait mengenai jumlah DPT.
11. Pemerintah perlu menyediakan tempat bagi masyarakat untuk dapat berekspresi dengan bebas dan tertib tanpa mengganggu kenyamanan pihak lain;

12. Lebih memperhatikan fasilitas bagi kelompok disabilitas dan lansia
13. Kaderisasi yang baik dalam partai-partai politik sehingga dapat menghasilkan politisi-politisi yang berintegritas dan kompeten;
14. Koordinasi bersama Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, FKUB dan Ormas Keagamaan dalam menciptakan sikap toleransi menghadapi pandemi Covid-19.
15. Melakukan sinergitas dalam Penanganan Konflik Sosial dan Peningkatan Deteksi Dini dengan aparat keamanan seiring meningkatnya gangguan kamtibmas pada masa pandemi Covid-19.
16. Melakukan sosialisasi P4GN

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan langkah awal ataupun dasar bagi setiap OPD dalam menyusun Renja SKPD. Dalam rancangan awal RKPD tercantum program-program yang dijadikan pedoman perencanaan pembangunan dengan membandingkan antara program pembangunan dari Pemerintah Provinsi dengan kebutuhan masyarakat setelah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat sehingga akan menghasilkan program-program prioritas untuk dijadikan rencana pembangunan provinsi.

Berikut Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah :

**Tabel 2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Ideologi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3.14	2.985.500.000	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Ideologi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3.14	2.985.500.000	
B	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Ormas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	2.92	42.575.000.000	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Ormas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	2.92	42.575.000.000	
C	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3.23	3.106.000.000	PROGRAM Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3.23	3.106.000.000	
D	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Pertahanan dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	2.70	17.246.400.000	PROGRAM Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Pertahanan dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	2.70	17.246.400.000	
E	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3.10	24.631.552.000	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jawa Tengah	Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3.10	24.631.552.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Melalui pelaksanaan Musrenbang diperoleh berbagai usulan terhadap kebutuhan masyarakat terhadap program pembangunan yang akan dijadikan rencana pembangunan provinsi. Melalui forum tersebut akan diketahui apa yang menjadi kebutuhan langsung masyarakat. Namun usulan yang masuk terlalu banyak dari jumlah usulan dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan penelaahan dan prioritas terhadap usulan yang ada. Berikut Usulan Program/Kegiatan Masyarakat hasil telaah :

**Tabel 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
A.	HIBAH SOSIAL KEMASYARAKATAN				
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jawa Tengah	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ormas	38.720.000.000	Usulan Hibah Sosial Masyarakat dan Hasil Reses/Aspirasi DPRD
B.	HIBAH INSTANSI VERTIKAL				
1.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jawa Tengah	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan	10.546.400.000	Usulan Hibah Instansi Vertikal yang terkait dengan Tupoksi Kesbangpol.
2.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Jawa Tengah	Jumlah Laporan Pendataan Parpol	20.369.890.000	Usulan Hibah Instansi Vertikal yang terkait dengan Tupoksi Kesbangpol.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan mandatory dibawah Kementerian Pusat Kementerian Dalam Negeri RI Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum, untuk itu arah kebijakan dari pusat pada tahun 2022 yang sesuai dengan bidang politik dan pemerintahan umum antara lain :

1. Peningkatan potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, Dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional;
2. Kecenderungan peningkatan konflik sosial; isu ini semakin hangat dimunculkan seiring dengan upaya segelintir orang yang memanfaatkan perbedaan etnis, agama dan sebagainya untuk memecah belah keutuhan bangsa.
3. Terorisme dan radikalisme; banyaknya warga negara indonesia yang teridentifikasi bergabung dengan kelompok terorisme seperti ISIS
4. Perubahan perilaku sosial masyarakat sebagai dampak teknologi dan informasi
5. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Indonesia sekarang bukan lagi merupakan negara transit narkoba tetapi merupakan negara pemakai.
6. Melemahnya pemahaman dan implementasi ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan; seiring dengan pengaruh globalisasi dan kebebasan dalam ruang demokrasi, orang semakin luntur dengan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sosialnya.
7. Kualitas demokrasi; nilai demokrasi yang diidentikkan dengan nilai kebebasan menentukan pilihan, pada kenyataannya hanya berkembang dalam ritual dan seremonial di sebagian besar kalangan untuk hadir memberikan suara pada saat pemilihan umum
8. Melemahnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; bahwa perilaku sosial masyarakat yang sangat konsumtif dan mengikuti hegemoni globalisasi, membawa dampak pada kehidupan yang pragmatis serba instan dan mengabaikan proses yang berkualitas

Dari kebijakan nasional tersebut, Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah merumuskan beberapa program prioritas pada tahun 2022 antara lain :

1. Pemetaan terhadap daerah rawan konflik sosial terutama konflik SARA dengan Penguatan Timdu PKS
2. Revitalisasi dan Aktualisaasi Nilai-Nilai Pancasila
3. Pelaksanaan Perda P4GN melalui Penyusunan Pergub, Efektifitas Timdu P4GN, Sosialisasi dan Penyuluhan Perda P4GN

4. Pengawasan Ormas serta Penguatan Timdu Pengawasan Ormas
5. Penguatan Peran dan Fungsi Forkopimda dalam menjaga kondusivitas wilayah Jawa Tengah
6. Penguatan Peran Toga, Tomas dan Ormas dalam menjaga kerukunan umat beragama
7. Penguatan Partisipasi Politik dan peningkatan peran partai politik

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Pada tahun 2022 sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2018-2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam kurun tahun 2022 – 2023 menetapkan tujuan sebagai berikut : ” Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah dan Meningkatnya Ketahanan IPOLEKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik”.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing-masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Pada tahun 2022 sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Perubahan Tahun 2018-2023, dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2022 - 2023, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatnya ketahanan IDEPOL Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- b. Meningkatnya Ketahanan EKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah beserta indikator kinerjanya dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	1. Persentase Nilai Kepuasan Masyarakat	Persen	75,00
		b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2. Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persen	73,19
2.	Meningkatnya Ketahanan IPOLEKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	a. Meningkatnya Ketahanan IDEPOL Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Indeks ketahanan IDEPOL Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3,12
		b. Meningkatnya Ketahanan EKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	2. Indeks Ketahanan EKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	2,97

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi SKPD dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah hanya melaksanakan fungsi kesatuan bangsa dan politik, sedangkan fungsi lain (perlindungan masyarakat) dilaksanakan oleh OPD pelaksana fungsi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda).

Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah memiliki rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp. 106.325.454.000,- sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah

Nama PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah									15,780,942,000		19,669,732,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	75		80		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah								2,408,062,000		3,603,462,000		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	73.19	2,408,062,000	78.44	3,603,462,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						2,408,062,000		3,603,462,000		
						Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100	2,408,062,000	100	3,603,462,000	SEKRETARIAT	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					2,408,062,000		3,603,462,000		
						Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	36	2,408,062,000	36	3,603,462,000	SUB BAGIAN PROGRAM	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01. 1.01.01			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1,606,086,000		2,645,782,000		
						Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yg disusun	Dokumen	16	1,606,086,000	17	2,645,782,000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01. 1.01.07			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				801,976,000		957,680,000		
						Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	Dokumen	20	801,976,000	21	957,680,000	SUB BAGIAN PROGRAM	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah								13,372,880,000		16,066,270,000		
						Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	75	13,372,880,000	80	16,066,270,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						13,372,880,000		16,066,270,000		
						Persentase ketercapaian administrasi pelayanan Perangkat Daerah	%	100	13,372,880,000	100	16,066,270,000	SEKRETARIAT	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8,450,574,000		10,925,120,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi keuangan Perangkat Daerah	Laporan	1	8,450,574,000	1	10,925,120,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	
		X.XX.01.1.02.01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				8,225,454,000		10,700,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	12	8,225,454,000	12	10,700,000,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.02			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				222,120,000		222,120,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Bulan	12	222,120,000	12	222,120,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.03			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1,500,000		1,500,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Laporan	1	1,500,000	1	1,500,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.02.04			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1,500,000		1,500,000		
						Jumlah dokumen laporan akuntansi perangkat Daerah	Dokumen	1	1,500,000	1	1,500,000	SUB BAGIAN KEUANGAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					80,000,000		80,000,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan	1	80,000,000	1	80,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.03.02			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				80,000,000		80,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah	Bulan	12	80,000,000	12	80,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					320,500,000		320,500,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1	320,500,000	1	320,500,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.05.02			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.03			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				15,000,000		15,000,000		
						Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Bulan	12	15,000,000	12	15,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.05			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				15,000,000		15,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah dokumen laporan penilaian kinerja pegawai	Dokumen	1	15,000,000	1	15,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.09			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				60,000,000		60,000,000		
						Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/ Seminar	Orang	100	60,000,000	100	60,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.05.10			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				230,500,000		230,500,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Orang	130	230,500,000	130	230,500,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Administrasi Umum Perangkat Daerah					1,196,806,000		1,310,650,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	Laporan	1	1,196,806,000	1	1,310,650,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.06.01			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				50,000,000		50,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	50,000,000	12	50,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.06.02			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				200,000,000		200,000,000		
						Jumlah bulan penyediaan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	200,000,000	12	200,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.03			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				100,000,000		120,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga perangkat daerah	Bulan	12	100,000,000	12	120,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.04			Penyediaan Bahan Logistik Kantor				180,000,000		180,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan logistik kantor	Bulan	12	180,000,000	12	180,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.05			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				85,000,000		85,000,000		
						Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Bulan	12	85,000,000	12	85,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.06			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				25,000,000		25,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	Bulan	12	25,000,000	12	25,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.08			Fasilitasi Kunjungan Tamu				55,650,000		55,650,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	55,650,000	12	55,650,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.09			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				426,156,000		500,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Bulan	12	426,156,000	12	500,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.10			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				15,000,000		25,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip	Bulan	12	15,000,000	12	25,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.06.11			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				60,000,000		70,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	Laporan	1	60,000,000	1	70,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					260,000,000		305,000,000		
						Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	260,000,000	1	305,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.07.01			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah unit pengadaan kendaraan dinas jabatan	Unit	0		0		SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.05			Pengadaan Mebel				50,000,000		70,000,000		
						Jumlah paket pengadaan meubelair	Paket	1	50,000,000	1	70,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.07.06			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				175,000,000		200,000,000		
						Jumlah paket pengadaan Peralatan dan Mesin	Paket	1	175,000,000	1	200,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.07.10			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				35,000,000		35,000,000		
						Jumlah paket Sarana dan Prasarana gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Paket	1	35,000,000	1	35,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					2,457,000,000		2,457,000,000		
						Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	2,457,000,000	1	2,457,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	
		X.XX.01.1.08.01			Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7,000,000		7,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat PD	Bulan	12	7,000,000	12	7,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.02			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				350,000,000		350,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi,air dan listrik PD	Bulan	12	350,000,000	12	350,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.08.04			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2,100,000,000		2,100,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	Bulan	12	2,100,000,000	12	2,100,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					608,000,000		668,000,000		
						Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	608,000,000	1	668,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.01			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				225,000,000		225,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan	Bulan	12	225,000,000	12	225,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.05			Pemeliharaan Mebel				3,000,000		3,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya biaya Pemeliharaan Mebel	Bulan	12	3,000,000	12	3,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.06			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				110,000,000		120,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Bulan	12	110,000,000	12	120,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		X.XX.01.1.09.09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				200,000,000		250,000,000		
						Jumlah Unit Gedung Yang Direhab	Unit	1	200,000,000	1	250,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		X.XX.01.1.09.10			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				70,000,000		70,000,000		
						Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala dsarana prasarana pendukung gedung kantor	Bulan	12	70,000,000	12	70,000,000	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
Meningkatnya Ketahanan IPOLEKSOS BUDHANKA MBidang Kesatuan Bangsa dan Politik									90,544,512,000		557,330,268,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Indeks Ketahanan IPOLEKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3.04		3.25			
	Meningkatnya Ketahanan EKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik								62,927,400,000		28,541,400,000		
						Indeks Ketahanan EKSOSBUDHANKAM Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	2.97	62,927,400,000	3.15	28,541,400,000		
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						42,575,000,000		8,425,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Indeks Ketahanan Ormas Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	2.92	42,575,000,000	3.11	8,425,000,000		
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat					42,575,000,000		8,425,000,000		
						Persentase masyarakat yang paham terhadap pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat	%	90.5	2,850,000,000	91.5	3,600,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.04.1 .01.03			Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				2,850,000,000		3,600,000,000		
						Jumlah masyarakat yang mengikuti mediasi sengketa ormas dan pengawasan ormas dan ormas asing di daerah	Orang	250	250,000,000	500	600,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah masyarakat yang mengikuti pemberdayaan ormas dalam rangka penanganan masalah sosial kemasyarakatan	Orang	3350	2,600,000,000	4000	3,000,000,000		
						Persentase penanganan pengawasan organisasi kemasyarakatan	%	100	39,725,000,000	100	4,825,000,000		
		8.01.04.1.01.01			Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				50,000,000		50,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Dokumen Program Kerja Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas yang tersusun	Dokumen	1	50,000,000	1	50,000,000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		8.01.04.1.01.04			Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				475,000,000		775,000,000		
						Jumlah Laporan Hasil Desk dan Verifikasi Ormas	Laporan	7	200,000,000	7	300,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Laporan pemberdayaan dan pengawasan ormas	Laporan	6	275,000,000	6	475,000,000		
		8.01.04.1 .01.05			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				39,200,000,000		4,000,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ormas	Laporan	35	39,200,000,000	35	4,000,000,000		OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi ; OPD Provinsi
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						3,106,000,000		3,420,000,000		
						Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3.23	3,106,000,000	3.39	3,420,000,000		
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					3,106,000,000		3,420,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase masyarakat yang paham terhadap Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)	%	90.5	2,586,000,000	91.5	2,665,000,000		
		8.01.05.1.01.03			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				2,586,000,000		2,665,000,000		
						Jumlah Masyarakat yang mengikuti Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan (orang)	Orang	283	230,000,000	300	309,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Masyarakat yang mengikuti Fasilitasi Pencegahan, Penyalahgunaan Narkotika (orang)	Orang	220	256,000,000	500	256,000,000		
						Jumlah Masyarakat yang mengikuti Pembinaan & Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (orang)	Orang	3000	2,100,000,000	3000	2,100,000,000		
						Prosentase tindakan pencegahan dampak ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	%	100	520,000,000	100	755,000,000		
		8.01.05.1.01.01			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				50,000,000		75,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah Dokumen Program Kerja Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Laporan	1	50,000,000	1	75,000,000		
		8.01.05.1.01.02			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				55,000,000		205,000,000		
						Jumlah Kajian Strategik atas Pemetaan/ Mapping Kondisi Ketahanan Bangsa (laporan)	Laporan	1	55,000,000	1	205,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.05.1.01.04			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				340,000,000		340,000,000		
						Jumlah laporan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan (laporan)	Laporan	1	60,000,000	1	60,000,000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (laporan)	Laporan	1	280,000,000	1	280,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.05.1.01.05			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				75,000,000		135,000,000		
						Jumlah laporan fasilitasi/ Pembinaan/ Monev Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (laporan)	Laporan	1	75,000,000	1	135,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						17,246,400,000		16,696,400,000		
						Indeks Ketahanan Pertahanan dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	2.7	17,246,400,000	2.9	16,696,400,000		
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial					17,246,400,000		16,696,400,000		
						Jumlah laporan fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan (laporan)	Laporan	1	13,196,400,000	1	12,346,400,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.06.1.01.01			Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				50,000,000		50,000,000		
						Jumlah Dokumen Program Kerja Bidang Kewaspadaan Nasional yang tersusun (dokumen)	Laporan	1	50,000,000	1	50,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.06.1.01.04			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				700,000,000		900,000,000		
						Jumlah laporan kunjungan VIP/VVIP (laporan)	Laporan	1	500,000,000	1	700,000,000		
						Jumlah laporan pantauan kunjungan orang asing (laporan)	Laporan	1	200,000,000	1	200,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.06.1.01.05			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				10,946,400,000		9,796,400,000		
						Jumlah Dukungan Pengamanan Tahapan Pemilu dan Pilpres/Kepala Daerah	Laporan	0		1	300,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan (laporan)	Laporan	1	10,946,400,000	1	9,496,400,000		
		8.01.06.1.01.06			Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi				1,500,000,000		1,600,000,000		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Forkopimda (laporan)	Laporan	1	1,500,000,000	1	1,600,000,000		
						Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial (%)	%	75	2,700,000,000	85	2,700,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.06.1.01.03			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				2,700,000,000		2,700,000,000		
						Jumlah Masyarakat yang mengikuti fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan (orang)	Orang	3000	2,100,000,000	3000	2,100,000,000		
						Jumlah Masyarakat yang mengikuti peningkatan kewaspadaan dan deteksi dini (orang)	Orang	380	600,000,000	380	600,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase penanganan konflik sosial (%)	%	100	1,350,000,000	100	1,650,000,000		
		8.01.06.1.01.02			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing, dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				850,000,000		1,000,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah kajian perumusan Penanganan Konflik Sosial (laporan)	Laporan	58	850,000,000	60	1,000,000,000		
		8.01.06.1.01.04			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			500,000,000		650,000,000			
						Jumlah laporan deteksi dini (laporan)	Laporan	1	200,000,000	1	250,000,000		
						Jumlah laporan penanganan konflik sosial (laporan)	Laporan	3	300,000,000	3	400,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Meningkatnya ketahanan IDEPOL Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik								27,617,112,000		528,788,868,000		
						Indeks ketahanan IDEPOL Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3.12	27,617,112,000	3.35	528,788,868,000		
		8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						2,985,500,000		3,449,050,000		
						Indeks Ketahanan Ideologi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3.14	2,985,500,000	3.4	3,449,050,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					2,985,500,000		3,449,050,000		
						Persentase masyarakat yang paham ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan (%)	%	80	2,512,665,000	90	2,674,181,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.02.1 .01.03			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan				2,372,500,000		2,520,000,000		
						Jumlah Masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pengembangan generasi muda lintas etnis (orang)	Orang	100	105,000,000	100	105,000,000		
						Jumlah Masyarakat yang mengikuti pendidikan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (orang)	Orang	3150	2,267,500,000	3350	2,415,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.02.1 .01.04			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan				140,165,000		154,181,000		
						Jumlah Laporan Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Prov dan Kab/Kota (laporan)	Laporan	1	110,165,000	1	121,181,000		
						Jumlah laporan Pembinaan Etnisitas dengan negara (laporan)	Laporan	1	30,000,000	1	33,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Prosentase masyarakat yang paham tindakan Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme (%)	%	80	472,835,000	85	774,869,000		
		8.01.02.1.01.01			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan				50,000,000		50,000,000		
						Jumlah Dokumen Program Kerja Bidang Ideologi yang tersusun (dokumen)	Laporan	1	50,000,000	1	50,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.02.1.01.03			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan				147,500,000		422,068,000		
						Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Pembinaan dan Pencegahan Ekstrimisme dan Terorisme (orang)	Orang	100	147,500,000	400	422,068,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.02.1.01.04			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan				8,925,000		9,750,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan deradikalisasi terhadap eks napiter dan masyarakat rentan (laporan)	Laporan	1	8,925,000	1	9,750,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.02.1.01.05			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan				266,410,000		293,051,000		
						"Jumlah Laporan Monev Bidang Bidang Ideologi dan Pembauran Kebangsaan (laporan)"	Laporan	1	266,410,000	1	293,051,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						24,631,612,000		525,339,818,000		
						Indeks Ketahanan Politik Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Nilai	3.1	24,631,612,000	3.3	525,339,818,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					24,631,612,000		525,339,818,000		
						Jumlah laporan fasilitasi perkembangan politik (laporan)	Laporan	1	21,119,520,000	1	21,257,490,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.03.1.01.01			Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				50,000,000		50,000,000		
						Jumlah Dokumen Program Kerja Bidang Politik Dalam Negeri yang tersusun (dokumen)	Laporan	1	50,000,000	1	50,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.03.1.01.04			<p>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik,</p> <p>Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>				355,030,000		472,900,000		
						Jumlah laporan Perkembangan Demokrasi di Jawa Tengah (laporan)	Laporan	1	355,030,000	1	472,900,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.03.1.01.05			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				20,714,490,000		20,734,590,000		
						Jumlah laporan pelaksanaan bantuan partai politik (laporan)	Laporan	1	149,790,000	1	163,500,000		
						Jumlah Laporan Pendataan Parpol (laporan)	Laporan	1	20,564,700,000	1	20,571,090,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Persentase kader partai politik yang paham terhadap penguatan kelembagaan politik (%)	%	89.5	382,110,000	90.5	445,000,000		
		8.01.03.1.01.03			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				382,110,000		445,000,000		
						Jumlah anggota parpol yang mengikuti pelatihan pemahaman keterbukaan informasi publik (orang)	Orang	100	57,110,000	160	100,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah anggota parpol yang mengikuti pelatihan penatausahaan bantuan keuangan partai politik (orang)	Orang	320	245,000,000	320	245,000,000		
						Jumlah kader parpol yang mengikuti pendidikan demokrasi dan etika budaya politik (orang)	Orang	100	80,000,000	160	100,000,000		
						Persentase masyarakat yang paham terhadap pendidikan politik (%)	%	89.5	2,402,920,000	90.5	502,735,308,000		
		8.01.03.1.01.03				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			2,402,920,000		502,735,308,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
						Jumlah masyarakat media/pers yang mengikuti pendidikan demokrasi dan etika budaya politik	Orang	100	80,000,000	100	92,388,000		
						Jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan dan demokrasi dan etika budaya politik (orang)	Orang	3340	2,322,920,000	3640	502,642,920,000		
						Persentase masyarakat yang paham terhadap penguatan pengembangan demokrasi (%)	%	89.5	727,062,000	90.5	902,020,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.03.1.01.02			Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				54,950,000		80,000,000		
						Jumlah kajian strategik pengembangan politik dan demokrasi di Jawa Tengah (laporan)	Laporan	1	54,950,000	1	80,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.03.1.01.03			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				557,020,000		697,020,000		
						Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi sistem dan implementasi politik (orang)	Orang	240	444,360,000	320	544,360,000		
						Jumlah perguruan tinggi yang terlibat dalam kemitraan pengembangan demokrasi (kab/kota)	Kabupaten/Kota	160	112,660,000	240	152,660,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja Perangkat Daerah	Lokasi
								2022		2023			
								Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		8.01.03.1.01.05			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				115,092,000		125,000,000		
						Jumlah laporan situasi dan kondisi politik dan demokrasi di Jawa Tengah (laporan)	Laporan	1	115,092,000	1	125,000,000		
TOTAL ANGGARAN 2022									106.325.454.000				

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 merupakan rencana pelaksanaan tahun kelima penyelenggaraan pemerintahan, yang disusun secara sinergis dan berkesinambungan dengan pertimbangan tugas dan fungsi organisasi. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dan diiringi peran aktif stakeholder yang ada di Provinsi Jawa Tengah antara lain Instansi Vertikal, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ormas/LSM, Partai Politik dan Aparat Keamanan. Tanpa adanya kerjasama yang harmonis maka pencapaiannya tidak akan optimal. Pada masa pandemi covid 19 dimana anggaran lebih berfokus pada penanganan covid 19 dan pemulihan ekonomi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah tetap berkomitmen agar tugas dan fungsi tetap bisa dilaksanakan dengan seoptimal mungkin.

Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat dan Bidang-bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk mengoptimalkan rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Renja 2022 dengan sebaik-baiknya dan kewenangannya.
2. Setiap unit pada lingkup Badan Kesbangpol yang secara langsung bertanggung jawab terhadap rencana kegiatan tersebut, dan berkewajiban untuk menuangkan rencana kegiatan tersebut ke dalam bentuk dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu RKA maupun DPA.
3. Setiap pengelola kegiatan maupun penanggung jawab kegiatan perlu melaksanakan pengendalian secara periodik melalui pelaporan, monitoring dan evaluasi. Hal ini perlu dilakukan mengingat kegiatan monitoring merupakan suatu proses manajemen yang tidak terpisahkan dengan fungsi lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan sedangkan kegiatan evaluasi juga sangat bermanfaat sebagai umpan balik bagi perencanaan yang akan datang.

Rencana tindak lanjut dengan ditetapkannya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, maka dokumen perencanaan ini akan dipergunakan sebagai pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan dokumen teknis operasional kegiatan, yaitu Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2022.

